

Pengembangan Industri Kecil untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Diani T. A. Ledo^{1)*}

¹⁾ Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Artha Wacana
Jl. Adi Sucipto No.147, Oesapa, Kelapa Lima, Kupang, Indonesia

¹⁾diani.ledo@yahoo.com

Rekam jejak artikel:

Terima 11 November 2022;
Perbaikan 1 Desember 2022;
Diterima 12 Desember 2022;
Tersedia online 19 Desember 2022.

Kata kunci:

Industri kecil
Ekonomi rakyat
Nusa Tenggara Timur
Timor Barat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang berbagai faktor yang dapat mendorong maupun menghambat penyerapan program pengembangan industri kecil pengolahan dan program pemberdayaan ekonomi rakyat untuk pengembangan industri pengolahan di kawasan Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, dampak pengembangan industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat dan solusi pengembangan industri kecil pengolahan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di kawasan Timor Barat Provinsi NTT akan diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *phenomenology* dengan responden yang berdomisili di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi NTT belum lepas dari berbagai kondisi yang menampilkan ketertinggalan dalam banyak aspek, terutama pada kawasan Timor Barat. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat.

I. PENDAHULUAN

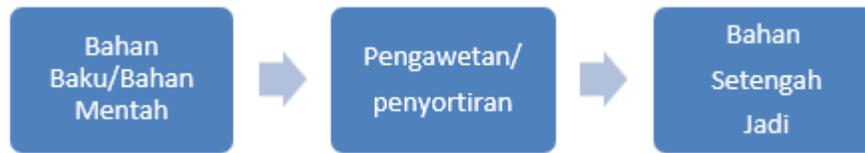
Provinsi NTT memiliki sumber daya alam, terutama laut (Kobesi, Kinseng, & Sunito, 2019) dan pertambangan (Kumalawati, Sir, & Mastaram, 2013) yang melimpah dan sangat berpotensi untuk dikembangkan bagi kesejahteraan masyarakat. Potensi lainnya adalah peternakan, perkebunan, pertanian (Kleden, Ratu, & Randu, 2015). Sedangkan perkembangan sektor industri kecil masih rendah dimana dalam sepuluh tahun ini kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) NTT tidak melampaui 2%, sehingga tidak memberi perubahan secara signifikan terhadap struktur ekonomi daerah.

Struktur ekonomi adalah gambaran dari kondisi ekonomi daerah yang menampilkan wajah dari kondisi masyarakat di daerah tersebut. Secara nasional Negara Republik Indonesia berhasil keluar dari keterbelakangan seperti dialami oleh negara-negara dunia ketiga. Salah satunya karena struktur ekonomi negara yang menempatkan sektor industri pengolahan sebagai basis pembangunan negara (Ningsih, 2014). Sektor industri pengolahan sebagai sektor sekunder memberikan kontribusi terbesar (Amin, Rumagit, & Katiandagho, 2015), dan besarnya presentase kontribusi sektor ini memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun berbanding terbalik dengan Provinsi NTT yang masih menempatkan sektor pertanian sebagai basis pembangunan daerah (Belieu & Fina, 2019).

Pola pertanian di NTT selama ini masih sangat tradisional (Mulu, Ngalu, & Lazar, 2020). Sehingga, hal ini tidak memberikan nilai tambah ekonomi dan perlu pergeseran pola pertanian NTT agar berorientasi pada nilai tambah ekonomi dengan perlahan-lahan mengubah pola pertanian tradisional menjadi pola pertanian yang berorientasi pada pertanian agribisnis dan agroindustri. Hal ini dapat dilakukan agar meningkatkan produktivitas pertanian dan menggeser pekerja dari sektor pertanian ke sektor Industri Pengolahan.

Kondisi industri kecil di NTT pada umumnya hampir sama yaitu dengan pola industri yang sangat sederhana, dari bahan mentah/baku ke bahan setengah jadi (Octavia, Yeny, & Ginoga, 2020). Bentuk yang paling sederhana adalah setelah panen dibersihkan, dan bahan pangan dilakukan pengawetan dengan memberi garam (Irawati, Mirzah, & Saladin, 2014) dan atau gula untuk memperpanjang daya tahan bahan mentah/bahan baku tersebut (Suwati, Ihromi,

& Asmawati, 2019). Bagi pengolahan non pangan setelah dibersihkan dibuat bahan setengah jadi/gelondongan terutama hasil hutan, tambang. Diagram proses industri di NTT umumnya seperti pada Gambar 1. Semua proses masih dilakukan dengan sangat sederhana sehingga nilai tambah yang diterima masyarakat sangat rendah.



Gambar 1. Proses industri sederhana di NTT

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang berbagai faktor yang mendorong dan menghambat penyerapan program pengembangan industri kecil pengolahan dan program pemberdayaan ekonomi rakyat untuk pengembangan industri pengolahan di kawasan Timor Barat Provinsi NTT. Selain itu, dampak pengembangan industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat dan solusi pengembangan industri kecil pengolahan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di kawasan Timor Barat Provinsi NTT akan dipelajari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *phenomenology* (Sari & Setyawan, 2017), dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. Terdapat 40 responden yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lembaga pemerintahan, pengusaha dan konsumen di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rentang usia antara 40 – 50 tahun.

III. HASIL

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di Kota Kupang

Pengembangan industri kecil pengolahan di Kota Kupang sesuai dengan Visi: “Terwujudnya masyarakat Kota Kupang yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera, dan berdaya saing” dengan misi yang ketiga. Kondisi industri kecil pengolahan di Kota Kupang didominasi oleh perusahaan perseorangan, walaupun terbentuk kelompok, itu tidak bersifat permanen. Kelompok dibentuk hanya untuk memenuhi persyaratan dalam mengakses bantuan yang disiapkan oleh pemerintah maupun organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah menerima paket bantuan tersebut, dalam perjalanan akan terbentur oleh karakter dari masing-masing anggota kelompok yang pada akhirnya akan membubarkan diri, dengan demikian kelompok hanya ada secara tertulis tapi tidak secara *real*. Kelompok yang terbentuk permanen hanya ada apabila dibentuk oleh perorangan dan menjadi bagian atau untuk mendukung usaha perorangan tersebut.

Kebijakan pengembangan industri kecil pengolahan di Kota Kupang bersifat pelaksanaan lanjutan dari program yang sudah ada dan disiapkan turunannya dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, tidak secara spesifik melihat kebutuhan industri kecil pengolahan tersebut. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut terjadi yakni perhatian pimpinan wilayah masih pada urusan-urusan yang lain dan berdampak secara politis guna keberlanjutan kepemimpinannya pada periode berikut, dan kebijakan pimpinan wilayah akan berubah bila sudah berada pada periode kedua dimana kepemimpinannya akan berakhir. Selain itu, keberpihakan pemerintah yang sangat rendah menyebabkan sektor ini tidak memiliki kapasitas untuk didorong maju tetapi diserahkan pada pelaku pasar, apakah berkembang atau tidak bahkan mundur dan akhirnya mati. Usaha yang biasa disebut dengan usaha papan nama artinya hanya ada papan nama usaha saja tapi usaha *real* tidak ada.

Kemudian, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program pembinaan dan pengembangan sangatlah rendah, hanya untuk satu kali saja dalam setahun dan tidak ditempatkan pada semua wilayah kecamatan sehingga dalam satu masa jabatan yang berlaku 5 tahun, sentuhan pembinaan dari pemerintah tidak berdampak signifikan untuk mendongkrak angka persentase kontribusi sektor industri kecil pengolahan terhadap PDRB-nya. Pemerintah juga perlu menganalisa berbagai potensi daerah terutama potensi sumber daya alam yang dapat mendorong faktor-faktor produksi di daerahnya dengan tersedianya bahan baku/bahan mentah dengan kapasitas yang cukup untuk proses produksi satu komoditi dalam jangka panjang.

Sesuai teori *The Resource Based Theory of Competitive Advantage Implications for Strategy Formulation* (Grant, 1991) sumber daya dan kemampuan perusahaan adalah langkah awal dalam strategi, selanjutnya bagaimana

keterkaitan sumber daya alam, kemampuan perusahaan mengelolanya dan kontinuitas pasokan bahan baku akan memberikan ketahanan dalam berusaha, yang akan memberi kekuatan agar industri kecil tersebut tetap bertahan. Hal penting yang menjadi perhatian adalah menjaga kontinuitas pasokan bahan baku dengan melakukan tindakan perbaikan untuk peningkatan kapasitas sumber daya alam. Kemudian, bahan baku industri kecil pengolahan di Kota Kupang dipasok dari Kabupaten Kupang sehingga menimbulkan ketergantungan yang saling menguntungkan karena wilayah Kabupaten Kupang yang melingkari batas wilayah Kota Kupang dan geografi wilayah yang luas sehingga dimungkinkan adanya penyediaan bahan baku industri dimaksud.

Merujuk pada teori 12 pilar pengembangan daya saing perusahaan, yang akhirnya akan menggerakkan dan meningkatkan ekonomi daerah berada pada kebutuhan dasar yaitu: Kelembagaan, Infrastruktur, Lingkungan Makro Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan Dasar, oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai tugas memfasilitasi adanya kelembagaan dan menyiapkan berbagai sarana prasarana pendukung seperti infrastruktur jalan, jembatan, pasar, transportasi baik darat, laut maupun udara dan hal tersebut sudah dilakukan. Selain itu Kota Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi NTT mendapat alokasi kegiatan pembangunan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi yang lokasinya di wilayah Kota Kupang sehingga semakin melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi tersebut.

Era globalisasi dan pasar bebas saat ini dimana bebas masuk dan keluarnya barang dan atau jasa membuat pemerintah harus berpikir keras tentang keberadaan daerah ini dan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tugas berat yang harus dilakukan adalah bagaimana tercipta kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan baik. Kegiatan industri yang memberi nilai tambah dalam kehidupan masyarakat harus menghasilkan komoditi yang memiliki kualitas internasional sehingga arus barang dari luar yang masuk ke daerah ini tidak mempengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi akan produk-produk tersebut, tetapi tetap mencintai produk dalam negeri.

Kecintaan terhadap produk dalam negeri akan menimbulkan ketahanan ekonomi dalam negeri karena arus barang masuk dan keluar serta rantai nilainya hanya terjadi di dalam negeri, dan tidak ada yang terbawa keluar. Jaringan distribusi barang yang dimulai dari daerah pabrikaan, ke distributor selanjutnya ke sub distributor, atau ke agen dan sub agen akan berakhir di pengecer dan dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu, daya saing internasional yang tercipta sesuai teori model 9 faktor daya saing internasional (Dong-Sung & Moon, 2003), menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat penting terutama dilihat dari bagaimana mendukung terciptanya industri pendukung terkait, membuat regulasi agar terjadi lingkungan bisnis yang kondusif. Faktor manusia yang memegang peran dalam mewujudkan lingkungan bisnis serta terciptanya industri pendukung terkait adalah para politisi dan birokrat.

Pembahasan tentang regulasi terkait dengan para anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang merupakan anggota partai politik sekaligus melaksanakan tugas-tugas pengawasan pembangunan, dan penganggaran untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Para birokrat yang adalah pejabat pemerintah bertugas melaksanakan kegiatan pemerintah, melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas, berkewajiban menciptakan industri terkait dan pendukung melalui pelaku ekonomi atau pengusaha swasta sehingga daya saing yang diinginkan dapat tercipta.

Karakteristik pengusaha kecil pengolahan di Kota Kupang cukup beragam, namun pada umumnya masih tergantung pada pembinaan pemerintah dan belum memiliki kemandirian berusaha, umumnya pengusaha industri kecil pengolahan memiliki jiwa wirausaha yang rendah dan tetap eksis bila ditopang pemerintah, dan akan berkurang atau mati sama sekali bila dibiarkan berusaha sendiri. Hal tersebut berbeda dengan pengusaha dari wilayah lain di luar NTT yang ulet dalam berusaha dan tahan uji sehingga menjadikan usahanya mapan. Data menunjukkan 80 % pengusaha industri kecil pengolahan yang terdaftar dan memiliki izin usaha adalah masyarakat NTT dari berbagai suku bangsa, salah satu alasan mereka mendaftarkan usahanya adalah untuk mendapatkan akses pembinaan dan bantuan dari pemerintah Kota Kupang. Dari segi jumlah sangat sedikit sementara kondisi terbalik terjadi pada pengusaha kecil industri pengolahan nonformal yang kurang lebih 300 % lebih banyak, didominasi oleh pelaku usaha atau masyarakat dari luar NTT dan melakukan kegiatan usaha tanpa mengharapkan fasilitas pembinaan dari pemerintah namun tetap eksis dalam berusaha.

Pemerintah Kota Kupang, belum maksimal dalam mendukung pengembangan industri kecil pengolahan, kebijakan pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan teori-teori dalam peningkatan ekonomi daerah disebabkan mayoritas adalah alasan politis. Selain itu, pengusaha industri kecil pengolahan juga belum memiliki karakter dan kemampuan sebagai pengusaha kecil yang tangguh. Inti dari pemberdayaan ekonomi adalah sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas dan kapasitas sebagai entrepreneurship serta dukungan penuh pemerintah dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha-usaha ekonomi berbasis sumber daya, serta masyarakat yang memiliki perspektif mandiri, rasa kebangsaan yang tinggi serta rasa cinta dan bangga untuk menggunakan produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, karakteristik wirausaha harus dimiliki oleh pengusaha kecil pengolahan, karakteristik tersebut merupakan inti dari entrepreneurship.

Pemerintah Kota Kupang belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi daerah sesuai teori Pengembangan Daya Saing sesuai Potensi Sumber Daya, untuk sumber daya alam Kota Kupang memiliki laut dengan beberapa daerah yang potensial untuk dijadikan tempat produksi garam yang akan melahirkan industri pengolahan garam, dan meningkatkan persentase industri pengolahan bahan pangan dengan bahan baku dari kabupaten lainnya, hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk yang cukup besar kurang lebih 300.000 orang dengan multi etnis, memungkinkan terserapnya konsumsi bahan pangan dengan keanekaragaman produk dan kualitas.

Potensiyang tepat dilakukan oleh pemerintah kota adalah mendorong pengembangan industri pengolahan pendukung sektor pariwisata dan jasa serta mengoptimalkan kegiatan perdagangan baik skala kecil, sedang maupun skala besar. Khusus untuk kegiatan pendukung perdagangan saat ini terlihat fenomena dibangunnya rumah toko/ruko baik yang berlantai 1, 2,3 bahkan berlantai 4 sebagai salah satu upaya menjawab permintaan konsumen. Kebijakan pengembangan industri kecil pengolahan belum nyata dilakukan dengan belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan lainnya yang mengatur secara khusus tentang industri apalagi tentang industri kecil pengolahan. Keberpihakan pemerintah baik politisi maupun birokrat lebih kepada sektor jasa dan perdagangan, dengan demikian hal ini hanya memberi nilai tambah yang sedikit kepada PDRB Kota Kupang. Nampak pada Gambar 2, hasil kerajinan sandang Kota Kupang yang dijual di toko- toko.



Gambar 2. Berbagai Produk Hasil Tenun Ikat di Kota Kupang.

Secara garis besar kondisi industri kecil pengolahan di Kota Kupang lebih dipertegas oleh Bapak Victor Umbu Manna, SE., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang sebagai salah satu responden yang mengatakan bahwa terdapat banyak kegiatan pemberdayaan namun sektor industri pengolahan belum bertumbuh secara signifikan, karena masyarakat terjebak dalam kemiskinan struktural yang secara sistematis berlangsung secara terus-menerus. Program pemerintah yang menambah kemiskinan adalah bantuan beras bagi masyarakat miskin/raskin yang membuat masyarakat berkurang daya juangnya dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, karena untuk sementara tercukupkan kebutuhan pokoknya.

Selanjutnya kebijakan pemerintah yang menempatkan staf tidak sesuai dengan kompetensi dalam pendidikan, pengalaman kerja serta keterampilan yang dimiliki mengakibatkan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap sektor ini menjadi kurang maksimal. Staf yang tepat berada pada tempat yang tepat (*the right man on the right place*) pada Dinas Perindag Kota tidak melampaui 30 % dari total jumlah pegawai pada instansi tersebut. Dampak langsung dari kondisi tersebut di atas adalah penyusunan program kurang tepat sasaran seperti program pemerintah yang berpihak pada rakyat tapi belum memberi perubahan secara parmanen karena pemerintah memberikan sarana usaha yang belum tentu dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan usahanya. Pemerintah hanya melakukan pelatihan saja, tidak memberikan hasil yang maksimal bagi pengembangan industri kecil, harusnya dilakukan supervisi untuk mengetahui kebutuhan industri kecil, dan selanjutnya dilakukan pendampingan bagi kelompok sasaran sehingga dapat mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi industri kecil dalam mengembangkan usahanya.

Kemiskinan masyarakat adalah kemiskinan alami karena budaya yang secara tidak langsung memiskinkan masyarakat. Orientasi ke masa depan tidak ada, yang penting cukup makan, dan untuk mengubah hal tersebut dibutuhkan perubahan cara berpikir dan menggunakan pendekatan keagamaan. Sarana yang penting disiapkan pemerintah adalah adanya balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memproduksi komoditi tertentu yang dikelola secara profesional, dan tidak menunggu dari pusat, partisipasi pemerintah tersebut

harus secara nyata dan terus-menerus. Kelebihan dalam pemasaran hasil produksi di Kota Kupang adalah Tata Niaga yang lebih efisien karena tersedia sarana perdagangan yang lengkap dan konsumen yang memiliki daya beli.

Namun hal tersebut belum memberikan dampak positif bagi pengembangan industri kecil pengolahan, salah satunya adalah anggaran yang disiapkan pemerintah dengan alasan untuk mengentaskan kemiskinan secara langsung di desa tidak memberikan kontribusi terhadap PDRB karena politik anggaran tidak dimaknai sebagai “menjawab kebutuhan” tetapi “menjawab kepentingan” dan sangat dominan saat ini. Kelemahan program pemerintah saat ini adalah: “Berdurasi masa jabatan”. Pihak di luar pemerintah (LSM lokal dan internasional) baik dalam skala regional, nasional dan internasional yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat memberi pengaruh dalam struktur ekonomi masyarakat namun belum signifikan, perubahan dilakukan secara bertahap dan pelan. Salah satu aspek eksternal yang mempengaruhi adalah iklim dan topografi daerah yang turut membentuk karakter masyarakat, namun diharapkan pemerintah tidak menganggap masyarakat itu bodoh dan hanya dijadikan sebagai obyek, tetapi juga subyek dan mitra pemerintah dalam kegiatan yang padat modal di pedesaan. Pengaruh iklim terhadap aktivitas sektor industri pengolahan adalah masyarakat dengan budaya pertanian dan peternakan cenderung memilih usaha pertanian dan peternakan.

Untuk intervensi program pemerintah, sebaiknya melakukan kajian “Mata pencaharian alternatif bagi petani/peternak “Pemerintah dapat melakukan intervensi dari hulu sampai hilir sehingga dapat menyediakan “lapangan kerja prioritas” (contoh: Gorontalo dikelola oleh PT bukan PD). Industri besar yang mungkin dibangun di Kota Kupang adalah: Pabrik Mangan. Masih menurut Bapak Victor Umbu Manna, SE, bahwa kekeliruan pemerintah adalah membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan wadah sosial untuk melakukan kegiatan pemberdayaan yang berorientasi bisnis dan beliau mengusulkan pada pemerintah dalam memajukan sektor industri pengolahan sebaiknya dalam kerangka 3 batu tungku, yaitu bidang ekonomi terkait dengan pendidikan dan kesehatan dalam satu gerak langkah pembangunan (Piet A. Tallo, SH). Pikiran-pikiran kritis beliau menjadi alternatif dalam membangun daerah ini yang didasarkan pada pengalaman beliau membina sektor industri pengolahan di Kota Kupang.

Kritikan beliau terhadap program pembinaan yang sudah dilaksanakan selama ini belum menjadi perhatian para pengambil keputusan lainnya sehingga kondisi ini terus berjalan sampai disadari benar oleh para pihak bahwa perlu dilakukan perubahan yang mendasar untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Ibu Ida, semangat kerja masyarakat Kota Kupang untuk berusaha belum maksimal (motivasi berusaha rendah) hal mana dipengaruhi lingkungan, budaya masyarakat, dan keluarga. Hal ini berarti belum adanya kemandirian dari setiap pribadi untuk usaha mandiri.

Salah satu pengusaha industri kecil pengolahan yang berhasil adalah sentra industri kecil kerajinan tenun ikat “Ina Ndao” yang maju karena binaan provinsi dan Kota Kupang, Dekranasda (bidang usaha dan produk), dan mendapatkan subsidi benang serta melakukan kegiatan magang ke daerah Jawa (Jepara) untuk diversifikasi produk. Kegiatan usaha industri kecil pengolahan di Kota Kupang tidak dipengaruhi oleh iklim, karena dalam setahun musim hujan hanya berlangsung antara 4 sampai 5 bulan, sedangkan musim kemarau berlangsung selama 7 sampai 8 bulan bahkan 9 bulan, sehingga kembali ke pribadi masing-masing pelaku industri, karena faktor eksternal sedikit berpengaruh terhadap aktivitas usaha industri masyarakat.

Industri kecil pengolahan yang unik dan spesifik dan menjadi ciri khas daerah adalah industri kecil tenun ikat yang berusaha dalam bentuk kelompok yaitu “Kelompok Tenun Ikat Sesawi” dengan 124 orang anggota di Kota Kupang, sedangkan kelompok industri yang lengkap ada di Kecamatan Alak. Pengaruh budaya positif juga ada pada kegiatan industri kecil di Kota Kupang yaitu industri berbasis pertanian dengan aneka produk berbahan baku jagung dan kacang tanah, dan yang berbasis hasil perkebunan dan kehutanan yaitu dari pohon lontar dan pohon asam dengan komoditi babeko, gula hela, gula lempeng, gula semut, marning jagung, dan manisan asam, tenteng kacang.

Pemerintah Kota Kupang mendorong pengembangan Usaha Kecil Menengah agar meningkat dari usaha perorangan yang belum berbadan hukum seperti penjual sayur, industri kecil pengolahan pangan baik yang berbahan baku lokal atau tidak, usaha perkiosan menjadi usaha berbadan hukum dan atau koperasi dengan memberi tambahan modal dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp5 juta s/d Rp 7 juta dengan bunga 2 % dari pokok dan Rp 50 juta dari pemerintah Provinsi NTT serta melakukan pembinaan manajemen usaha yang baik.

Dana ini disalurkan tidak melalui kelurahan tetapi dilakukan langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang, berbeda dengan dana Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa yang disalurkan melalui kelurahan se Kota Kupang. Ada hal yang menarik, menurut Ibu Ida Potokatoe, untuk mendorong pengembangan Koperasi, maka dihimbau kepada kelompok-kelompok arisan untuk melegalisir kelompok tersebut menjadi Koperasi.

Secara umum industri kecil pengolahan memanfaatkan musim panas dalam kegiatan industri makanan berbasis perikanan dan usaha industri tenun ikat dan makanan yang membutuhkan panas matahari dalam proses produksinya. Untuk musim dingin/hujan dimanfaatkan dengan kegiatan industri yang cocok dengan iklim tersebut. Masalah

pengembangan usaha industri kecil pengolahan di Kota Kupang umumnya adalah kemasan/*packaging* yang belum memenuhi standar kemasan yang baik dan benar, hal tersebut menyebabkan banyak produk yang dihasilkan oleh pengusaha industri kecil pengolahan belum bisa dipasarkan melalui pusat-pusat perbelanjaan modern seperti pada toko-toko, mini market Supermarket, Hyperstore dll, tetapi dipasarkan pada kios-kios dan toko kecil saja.

Mendengar penjelasan dari Ibu Ida Potokatoe terbersit pertanyaan dalam hati, kapan semua pengusaha kecil menengah terutama di sektor industri kecil pengolahan menikmati kue pembangunan, bila ribuan jumlah pengusaha kecil, terutama yang nonformal dan rentan terhadap mati dan hidupnya usaha sementara di sisi lain program pembinaan hanya menyentuh 0,001 % dari total jumlah pengusaha kecil tersebut? Semoga Tuhan menyertai setiap usaha dan karya Kita.

Pemerintah Kota Kupang memiliki program unggulan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang disebut “Pemberdayaan Masyarakat” dan dikelola oleh Badan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa yang mekanisme penyalurannya melalui kelurahan-kelurahan di Kota Kupang, demikian dijelaskan oleh Ibu Imelda Manafe, Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Ekonomi Lemah Badan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa, Kota Kupang.

Menurut penjelasan Ibu Imelda Manafe bantuan yang diberikan dalam bentuk dana sesuai proposal dari pemohon untuk usaha ekonomi produktif baik itu kelompok maupun perorangan dalam bidang pertanian yaitu menanam padi, menanam sayur-mayur dan holtikultura; bidang peternakan yaitu memelihara atau beternak ayam, babi, kambing, sapi; Bidang perdagangan yaitu perkiosan; Bidang Jasa yaitu Jasa Fotocopy, Sablon dan Iklan/Reklame, Studio Foto, Bengkel; Bidang industri yaitu Industri Kecil Tenun Ikat, Batako dan Batu Bunga.

Prosedur yang harus dilalui pemohon adalah melalui kelurahan dan akan dilakukan verifikasi lapangan bersama team dari BPMPD dan instansi terkait pemerintah Kota Kupang seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dll. Khusus yang berusaha di bidang industri pengolahan menurut Ibu Imelda, 60% dari permohonan bergerak di bidang tersebut. Pembinaan yang dilakukan setelah mendapat bantuan modal adalah memberi pelatihan untuk peningkatan keterampilan dalam memproduksi produk tertentu, dan bantuan bahan baku sebagai motivasi untuk tetap melakukan kegiatan usaha, contoh: bantuan benang tenun untuk pengrajin tenun ikat, diharapkan pengusaha kecil yang mendapat bantuan memiliki kemandirian sehingga pemerintah dapat membantu pengusaha kecil lainnya.

Bantuan dana yang diberikan perkelurahan sesuai permohonan dalam proposal yaitu rata-rata permintaan proposal yang masuk berkisar antara Rp100 juta s/d Rp150 juta/orang, paling rendah Rp50 juta untuk bidang industri, dari daerah Kolhwa, Sikumana; bidang pertanian dari Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa Kelurahan Oepura, untuk usaha industri kecil tenun ikat, usaha hasil perikanan, dan industri kecil Batako dan Batu Bunga dari Naikolan. Pembinaan yang dilakukan pemerintah Kota Kupang untuk menguatkan usaha kecil yang diberikan penguatan modal usaha adalah dengan melihat permasalahan yang dialami pengusaha kecil tersebut antara lain pengusaha kecil perlu pendampingan namun, belum dilaksanakan secara kontinue dari instansi terkait antara lain dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dll.

Terkait penggunaan bahan baku industri antara lain tanah putih, pasir, pisang berasal dari daerah Fatukoa, Sikumana, Naioni di wilayah Kabupaten Kupang sementara untuk bahan baku industri kecil tenun ikat yaitu benang baik benang dengan pewarna sintetis maupun dengan pewarna alami berasal dari Kota Kupang. Strategi penyediaan bahan baku dari daerah Naioni, Fatukoa, Kolhwa adalah langsung ke pengusaha industri kecil pengolahan. Untuk kelompok tani diberikan bantuan traktor, motor air, bibit, pupuk. Untuk sektor peternakan diberikan bantuan bibit, pakan ternak, sarana kandang dan obat – obatan serta vitamin untuk hewan.

Selanjutnya Ibu Imelda mengatakan bahwa persiapan kondisi industri kecil pengolahan menyambut posisi strategis Kota Kupang dalam kebijakan dalam negeri maupun kebijakan internasional di masa yang akan datang adalah mensiasati masalah kurangnya pendampingan dari instansi terkait, karena kebanyakan belum memiliki izin usaha, proses birokrasi sangat menyulitkan, walau ada perizinan satu pintu, tapi harus ke kelurahan dan kecamatan lagi. Karena itu program yang memudahkan bagi pengusaha kecil adalah keringanan untuk mengurus SITU, SIUP bagi pengusaha IK. Izin dari Badan POM, dan Dinas Kesehatan merupakan salah satu persyaratan untuk pemasaran produk ke supermarket selain dari PIRT, Disperindag dll. Menyiapkan zona untuk aktifitas bagi pengusaha kecil perdagangan nonformal yaitu pedagang keliling dan pedagang kaki lima.

Potret Kota Kupang adalah kota jasa dan perdagangan, tapi industri juga berkembang dimana ada korelasi antara aspek pemasaran dengan aspek produksi. Ke depan industri yang cocok didirikan di Kota Kupang dalam skala besar adalah Industri Kemasan, yaitu mendirikan rumah kemasan sekaligus klinik kemasan untuk menjawab persoalan kemasan dari berbagai produk industri kecil baik dari Kota Kupang maupun dari kabupaten lainnya di NTT.

Sektor industri pengolahan lainnya terutama pengolahan pangan dalam skala mikro juga diharapkan semakin berkembang, salah satunya adalah industri pengolahan abon sapi. Penjelasan dan informasi yang diberikan Ibu Imelda sejalan dengan pikiran dan pendapat penulis, sesuai kondisi real lapangan masih banyak yang harus

dilakukan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Kupang

Pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Kupang juga didominasi oleh perusahaan perseorangan, namun karakteristik dominan pengusaha kecil di kabupaten yang adalah etnis Timor membuat beberapa kelompok bertahan karena etnis Timor memiliki karakteristik yang selalu berkelompok untuk mengerjakan sesuatu dalam tata kehidupan bermasyarakat. Kelompok yang terbentuk permanen hanya ada apabila dibentuk oleh perorangan dan menjadi bagian atau untuk mendukung usaha perorangan tersebut, juga karena wilayah Kabupaten Kupang juga didiami oleh etnis lain seperti Rote atau Sabu dan etnis lainnya.

Kebijakan pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Kupang bersifat pelaksanaan lanjutan dari program yang sudah ada dan disiapkan turunannya dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan tidak secara spesifik melihat kebutuhan industri kecil pengolahan pada daerah tersebut. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut terjadi yang juga dialami kabupaten lain kecuali bahan baku industri kecil pengolahan di Kabupaten Kupang pasok dari Kabupaten Kupang sendiri dan kabupaten lain sedaratan Timor dan atau bahkan dari daerah di luar Pulau Timor dan atau dari luar Provinsi NTT sehingga menimbulkan ketergantungan, namun saling menguntungkan, hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Kupang yang melingkari batas wilayah Kota Kupang dan geografi wilayah yang luas dan dimungkinkan adanya penyediaan bahan baku industri dimaksud.

Karakteristik pengusaha kecil pengolahan di Kabupaten Kupang beragam model, namun pada umumnya masih tergantung pada pembinaan pemerintah dan belum memiliki kemandirian berusaha, umumnya pengusaha industri kecil pengolahan memiliki jiwa wirausaha yang rendah dan tetap eksis bila ditopang pemerintah, dan akan berkurang atau mati sama sekali bila dibiarkan berusaha sendiri.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Kupang, belum maksimal dalam mendukung pengembangan industri kecil pengolahan, kebijakan pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan teori-teori dalam peningkatan ekonomi daerah yang lebih banyak disebabkan karena alasan politis.

Pemerintah Kabupaten Kupang belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi daerah sesuai teori Pengembangan Daya Saing sesuai Potensi Sumber Daya. Untuk sumber daya alam, Kabupaten Kupang memiliki laut dengan beberapa daerah yang potensial melahirkan industri pengolahan garam, dan tempat produksi rumput laut yang akan mendukung adanya banyak industri yang berbahan baku rumput laut seperti industri bahan pangan, obat – obatan dan industri kosmetik, juga potensi bahan tambang seperti mangan yang tersebar merata di permukaan tanah Kabupaten Kupang serta batu marmer, disamping potensi peternakan dengan hamparan sabana dan steпа yang sangat luas sebagai sarana pengembalaan ternak. Potensi yang tepat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kupang adalah mendorong pengembangan industri besar berbasis peternakan, dan bahan tambang serta industri kecil pengolahan pangan yang berbahan baku jagung, ketela pohon serta pisang dan kelapa.

Kegiatan pendukung perdagangan dan jasa juga berpotensi mengingat Ibu Kota Kabupaten Kupang yang baru di Oelamasi membutuhkan berbagai aktivitas perdagangan dan jasa terutama jasa perkantoran seperti Alat Tulis Kantor dan Jasa Fotocopy. Kebijakan pengembangan industri kecil pengolahan belum nyata dilakukan dengan belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan lainnya yang mengatur secara khusus tentang industri apalagi tentang industri kecil pengolahan.

Keberpihakan pemerintah baik politisi maupun birokrat lebih kepada sektor primer seperti pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan dengan demikian hal ini memberi nilai tambah yang sedikit dari sektor sekunder yaitu industri pengolahan kepada PDRB Kabupaten Kupang apalagi sektor tersier yaitu jasa dan perdagangan. Secara garis besar kondisi industri kecil pengolahan di Kabupaten Kupang lebih diperjelas sesuai hasil wawancara penulis dengan Bapak Yohanis Niuf Eki sebagai Kepala Seksi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang yang mengatakan bahwa masalah pembinaan industri di Kabupaten Kupang terkendala infrastruktur, sehingga dibutuhkan sarana mobilitas untuk menjangkau sampai ke semua lokasi pembinaan yaitu desa bahkan sampai dusun. Sarana mobilitas yang dimaksud adalah kendaraan yang cocok dan mampu melewati medan berat, yaitu kondisi jalan yang hanya dengan pengerasan, berlumpur, berbatu serta sungai, dan atau kali yang tidak memiliki jembatan yang berjumlah ratusan sungai besar dan kecil di wilayah Kabupaten Kupang. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat untuk menjual hasil bumi yang berpotensi bahan baku industri ke kota sebagai daerah pemasaran.

Masalah terkait masyarakat adalah mental manusianya yang dinabobokan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah namun kemampuan SDM relatif rendah, semua serba ada tapi hanya diambil dan dikonsumsi saja, tidak mau mengolah lebih lanjut. Untuk mengubah mental dari petani ke home industry, masih butuh banyak waktu.

Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat atau Non Government Organization baik yang lokal maupun internasional sangat baik, oleh karena itu sarana prasarana agar tidak dibina di daerah Kupang Timur dan Kupang Tengah dan daerah yang dekat saja tetapi juga daerah – daerah jauh seperti Amarasi dan Amfoang.

Pola pembinaan industri besar dengan tenaga kerja sebanyak kurang lebih 1500 orang dari Kabupaten Kupang cukup besar untuk skala kabupaten sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam menentukan solusi untuk setiap masalah membangun daerah dan masyarakat. Pemerintah perlu optimistis dalam membangun daerah sehingga masalah – masalah antara lain manajemen usaha, produksi, dan sarana prasarana dapat dibantu penyelesaiannya. Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memandang perlu dilakukannya program Kewirausahaan yang akan diprogram pada anggaran perubahan dan selanjutnya pada anggaran murni setiap tahun anggaran. Fokus pada Manajemen Usaha, tidak saja pada proses produksi dan bantuan sarana prasarana dipandang sebagai solusi dalam menyelesaikan beberapa masalah sekaligus.

Untuk ketahanan pangan keluarga, harus ada kerja sama antara Pertanian, Koperasi dan Disperindag serta Bapeldalda untuk komoditi yg bisa ditanam demi pangan keluarga, sementara di sisi lain perlu muatan lokal untuk industri pengolahan dan diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mengubah *mindset* masyarakat dalam menghidupi diri sendiri tanpa orientasi menjadi Pegawai Negeri Sipil. Harapan dalam mendukung pengembangan industri pengolahan disiapkan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan bagi yang belum ada, serta memperbaiki jembatan yang sudah rusak oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memudahkan dalam pemasaran produk dan atau komoditi.

Narasumber selanjutnya adalah Bapak Nahum Muskanan, SE, Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kupang dengan tugas pembinaan kelembagaan dan manajemen, mengemukakan data dan informasi pembinaan terhadap UKM bahwa, pertumbuhan UKM sektor industri pengolahan sangat sedikit, padahal potensi komoditi sangat besar. Dari total UKM sebanyak 2.300 unit, hampir tidak ada yang berusaha di sektor industri pengolahan karena program pemerintah juga lebih mendorong sektor primer dan masyarakat menangkap peluang pasar tentang kebutuhan bahan baku untuk kegiatan industri di Kota Kupang (terbanyak sektor pertanian) sedangkan posisi sektor industri pengolahan saat ini masih kosong.

Industri pengolahan yang berkembang dengan baik seperti pembuatan batu bata dapat memberikan nilai tambah yang salah satu fungsinya adalah untuk *saving*/tabungan dan industri kerajinan alat musik Sasando yang menjadi *trade mark* alat musik NTT seperti nampak pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Maestro Alat Musi Sasando Bapak. Yermias Paulus Pah di Kabupaten Kupang

Melihat kondisi ini maka sebaiknya ada unit penerima komoditi yang terdiri dari kolaborasi pemerintah dan pengusaha. Masalah terbesar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kupang adalah masing–masing sektor berpikir berbeda tentang komoditi apa yang akan dikembangkan sehingga sulit untuk menyatukan kekuatan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat.

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kabupaten Timor Tengah Selatan dari aspek industri kecil pengolahan, adalah yang terendah di antara empat kabupaten obyek penelitian. Penulis tertarik pada wilayah ini yang sangat subur dengan sumber daya alam yang melimpah namun masyarakatnya belum menikmati hasil dari dukungan sumber daya alam tersebut yang nampak dari adanya anggota masyarakat yang masih miskin. Kebijakan pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan bersifat pelaksanaan lanjutan dari program yang sudah ada dan disiapkan

turunannya dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan tidak secara spesifik melihat kebutuhan industri kecil pengolahan pada daerah tersebut.

Sama seperti yang dialami kabupaten lain, ada beberapa faktor mengapa hal tersebut terjadi seperti bahan baku industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan berasal dari dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tersedia cukup banyak untuk mendukung kegiatan industri kecil pengolahan bahkan kapasitas bahan bakunya melampaui kebutuhan kapasitas produksi sehingga bahan baku itu dijual ke daerah lain yang membutuhkan.

Karakteristik pengusaha kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga beragam model, namun pada umumnya masih tergantung pada pembinaan pemerintah dan belum memiliki kemandirian berusaha, begitu juga pengusaha industri kecil pengolahan umumnya memiliki jiwa wirausaha yang rendah dan tetap eksis bila ditopang pemerintah, dan akan berkurang atau mati sama sekali bila dibiarkan berusaha sendiri.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, belum maksimal dalam mendukung pengembangan industri kecil pengolahan, kebijakan pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan teori-teori dalam peningkatan ekonomi daerah yang kebanyakan disebabkan karena alasan politis. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi daerah sesuai teori Pengembangan Daya Saing sesuai Potensi Sumber Daya, untuk sumber daya alam Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki potensi hasil kehutanan dan pertambangan.

Pada beberapa lokasi yang memiliki potensi bahan tambang seperti daerah Kolbano dengan batuan berwarna putih, pink dan merah muda dalam berbagai ukuran yang cocok menjadi batu hiasan untuk kebutuhan hotel berbintang. Daerah Mutis dengan batu marmer berwarna merah oranye/ jingga, yang dapat dijadikan bahan baku industri kerajinan, selain itu tersebar bahan tambang mangan di hampir seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ada lokasi-lokasi tertentu yang memiliki potensi untuk tempat produksi garam yang akan melahirkan industri pengolahan garam, yang bisa memenuhi kebutuhan konsumsi garam masyarakat dan selebihnya untuk kebutuhan industri kecil pengolahan yang membutuhkan garam dalam proses produksinya. Untuk komoditi hasil kehutanan, asam jawa memiliki potensi sangat besar dan bagus baik dari kapasitas produksi yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kualitas yang tinggi untuk industri makanan, dan minuman, kosmetika, dan obat-obatan. Output lain dari asam jawa yang memiliki nilai jual tinggi dan sangat dibutuhkan oleh industri sandang adalah tepung biji asam jawa yang memiliki fungsi sebagai pengikat warna pada benang.

Potensi hasil kehutanan lainnya adalah pada kayu – kayuan dan madu hutan, semua potensi ini bila ditangani dengan tepat akan mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan mendirikan dan mengemb-angkan industri besar berbasis bahan tambang, dan hasil hutan. Banyak informasi yang diberikan oleh narasumber Bapak Benny Frits Tobo, SE, salah seorang pejabat eselon III pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Timor Tengah Selatan, bahwa program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kabupaten TTS didukung semua instansi teknis namun belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan sektor industri pengolahan karena minimnya kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi produksi yang masih rendah, penguasaan informasi pemasaran dan relasi jaringan dan atau jalur distribusi yang terbatas.

Budaya yang melekat masih mengikat dan masyarakat terpaku pada kultur, sumber daya alam yang melimpah tapi kurangnya kompetitor yang menyebabkan rendahnya tingkat kompetisi. Program pemerintah yang bersifat instan dan kurangnya tindak lanjut program baik dalam bentuk kegiatan pendampingan maupun monitoring dan evaluasi. Anggaran yang diberikan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan langsung di desa, namun tidak memberikan kontribusi bagi PDRB daerah selain karena motivasi SDM masih rendah untuk berusaha di sektor industri pengolahan, juga belum adanya sarana perdagangan terutama pelabuhan laut, untuk melakukan pengiriman/antarpulau komoditi yang selama ini masih dilakukan melalui pelabuhan yang ada di Kota Kupang, Kabupaten TTU dan Kabupaten Belu. Terbatasnya sarana jalan dan jembatan yang menjangkau daerah-daerah sentra produksi.

Banyak pihak di luar pemerintah (NGO/ LSM dll.) yang juga melakukan kegiatan pemberdayaan, namun perubahan pola pikir masyarakat merupakan hal mendasar yang sangat memengaruhi perilaku berindustri. Masyarakat melakukan kegiatan industri tidak fokus sebagai pekerjaan utama tetapi hanya sebagai pekerjaan sampingan. Masyarakat Kabupaten TTS disebut sebagai Atoin Pah Meto selain Kabupaten TTU, sementara Kabupaten Kupang masih ke arah suku Helong, Rote dan Sabu begitu juga Kota Kupang yang multi etnis, memiliki budaya Timor yang dapat dinilai memiliki pengaruh positif dan atau negatif terutama budaya gotong royong terkait aktivitas industri.

Pengaruh iklim dan topografi daerah sangat berpengaruh terhadap aktivitas industri, sebagai daerah dataran tinggi dan berhawa sangat sejuk Kabupaten TTS lebih cocok sebagai daerah pariwisata/ peristirahatan dan daerah

pendidikan dibandingkan sebagai daerah industri. Kalaupun ada industri, yang cocok adalah industri pendukung wisata seperti kerajinan, pangan dan sandang, tapi bukan kimia dan bahan bangunan atau logam dan elektronik. Perilaku masyarakat sehari-hari bangun pagi, masih berselimum, menghangatkan badan di perapian, agak siang baru mulai bekerja di ladang sehingga hanya sebentar sudah menjelang sore, lalu beristirahat. Jadi waktu yang dipakai untuk kegiatan produktif sangat terbatas. Pekerjaan hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekeluarga bukan sebagai pekerjaan utama dalam menghidupi keluarga dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi, memiliki hunian yang lebih baik dan sehat, memiliki kendaraan yang memudahkan mobilitas keluarga kemana saja.

Untuk musim hujan dilakukan kegiatan pertanian untuk kecukupan pangan keluarga, dan di musim panas tidak melakukan kegiatan tersebut, karena iklim cocok untuk tanaman perkebunan yang berumur panjang juga kehutanan menyiapkan bahan pangan yang bisa dikonsumsi maupun dijual dan mendapatkan hasilnya untuk dibelikan kebutuhan pokok keluarga. Industri besar yang cocok adalah yang berbasis pertambangan (mangan), kehutanan (tepung biji asam jawa), sementara industri sedang lebih cocok ke komoditi pertanian (jeruk keprok, apel, bawang putih, bawang merah, sapi), dan industri kecil adalah tenun ikat (sandang).

Kualitas SDM pendukung sektor industri pengolahan masih rendah, padahal dibutuhkan sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurs dan tidak tergantung pada aktivitas/ sarana pemerintah. Program pemerintah yang mendorong pengembangan sektor industri pengolahan sudah ada namun masyarakat masih terikat kultur, disamping belum ada regulasi terkait sektor industri pengolahan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini belum cocok untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, sehingga diharapkan lebih banyak kegiatan motivasi berusaha dan kewirausahaan untuk membuka pola pikir masyarakat.

Penerimaan masyarakat terhadap program pemerintah belum optimal sehingga hasil pelaksanaannya juga sangat minim, pemerintah juga harus fokus daerah ini mau dikembangkan seperti apa, yaitu dengan satu sektor sebagai leading-nya misalnya sektor pendidikan dan pariwisata. Narasumber berikut adalah Bapak F. M. Oematan MSi, Kepala Kantor Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan yang membenarkan bahwa terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang salah satunya adalah PNPM Mandiri, yaitu program pemerintah pusat yang lebih mengarah ke fisik sesuai permintaan dari masyarakat.

Intervensi pemerintah terhadap program ini hanyalah rekomendasi bahwa benar masyarakat tersebut membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur pada umumnya yaitu pembuatan jalan desa, namun kelemahannya, bahwa secara finansial program ini berada pada Bappeda Kabupaten TTS bukan pada BPMPD sebagai leading sector. Hal yang aneh karena Bappeda adalah Badan Perencana dan bukan sebagai pelaksana teknis, hal tersebut membuat instansi teknis tidak bisa melakukan aktivitas penting dalam fungsi manajemen yaitu melakukan monitoring dan evaluasi, akibatnya pemerintah daerah tidak bisa mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program dimaksud.

Selanjutnya beliau mengutarakan bahwa program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah Provinsi NTT yaitu Anggur Merah juga mendapat perlakuan yang sama yaitu secara program dan finansial berada pada Bappeda Kabupaten Timor Tengah Selatan, kondisi ini sama dengan Kabupaten Timor Tengah Utara namun berbeda dengan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pada instansi yang dipimpinya hanya melakukan kegiatan pelatihan pengolahan guna membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, namun persentase sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang meliputi 32 kecamatan dan 266 desa yang diharapkan adalah adanya integrasi program pemberdayaan masyarakat oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah, dengan demikian keterpaduan ini mendorong dengan kuat pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga memiliki program pemberdayaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten yaitu duplikat dari program Anggur Merah yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER). Menurut beliau daerah ini cocok menjadi daerah pariwisata dan pendidikan, serta komoditi yang menjadi unggulan adalah Bahan Galian, atau Batu Gamping yang setelah dipoles menjadi Batu Marmer, selanjutnya Asam Jawa, Ubi Kayu dan Jarak.

Masyarakat daerah ini biasa disebut Atoin Pah Meto memiliki karakter yang sulit mengambil resiko secara individual padahal itu adalah salah satu karakter dari wirausaha sehingga peluang untuk mengambil pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan usaha yang memiliki resiko minim sekali pemanfaatannya.

Di sisi lain bila dihadapkan pada acara adat maka yang tidak ada bisa diadakan secara bersama demi terlaksananya acara adat tersebut, artinya keberanian individual itu muncul bila secara bersama melakukan sesuatu. Masalah pengembangan usaha termasuk industri kecil pengolahan terletak pada mentalitas individu yang kurang

mampu memanager usahanya, sehingga perlu diadakan pelatihan manajemen usaha selain pelatihan untuk meningkatkan keterampilan melakukan kegiatan proses produksi.

Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan 3 swapraja yaitu, Amanuban, Amanatun dan Mollo masing-masing memiliki karakter masyarakat yang berbeda, karakter orang Amanuban sulit ditebak antara yang dibicarakan, dipikir dan dilakukan berbeda, sementara orang Amanatun, secara langsung menyatakan pikirannya dan sesuai dengan yang dilakukan, untuk orang Mollo memiliki kemandirian dan berjiwa bisnis ,karena kenyataannya masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berusaha di sektor swasta mayoritas adalah orang Mollo.

Kondisi masyarakat saat ini yang belum sejahtera bukan saja kesalahan mereka dalam mengelola hidupnya,tetapi juga kesalahan pemerintahan yang tidak secara baik menjalankan fungsi – fungsi mereka dalam melayani dan mengayomi masyarakatnya. Untuk pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan mutlak diperlukan integrasi program pembinaan dari satuan kerja perangkat daerah terkait sehingga mampu mendorong dengan kuat sektor ini.

Informasi tambahan tentang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan industri kecil pengolahan penulis dapatkan dari Bapak Octas Budiman Tallo, ST.MT, yang sebelumnya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan saat ini bertugas pada Dinas Pertambangan Kabupaten TTS, menurut beliau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan nonpemerintah belum memberikan hasil yang signifikan pada sektor industri pengolahan karena sumber daya manusia yang masih rendah dan penguasaan teknologi yang minim serta keterbatasan mesin dan peralatan.

Banyak program yang berpihak kepada rakyat namun tidak memberi perubahan dalam taraf hidup rakyat secara parmanen karena program yang dilakukan pemerintah tidak atau kurang tepat dalam memandirikan masyarakat seperti bantuan tunai langsung yang justru membuat masyarakat semakin malas dalam mengelola sumber daya yang ada. Banyak anggaran yang disiapkan pemerintah dengan alasan untuk mengentaskan kemiskinan yang langsung di desa tetapi tidak memberi kontribusi bagi PDRB karena masyarakat sudah terlalu dimanja sehingga motivasi untuk maju tidak ada lagi, yang ada hanya harapan mendapat bantuan dari pemerintah.

Banyak pihak di luar pemerintah skala regional, nasional dan internasional yang mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, namun tidak berpengaruh signifikan dalam struktur ekonomi daerah karena perilaku hidup masyarakat yang cenderung menerima apa yang diberikan sedangkan motivasi untuk mengelola apa yang ada tidak terdapat di masyarakat. Pengaruh budaya Timor terhadap pengembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten TTS yaitu rendahnya motivasi berusaha secara perorangan karena budaya masyarakat Timor yang berkelompok dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.

Pengaruh iklim dan topografi daerah membentuk karakter masyarakat lebih menyerah pada kondisi alam, contoh pada kondisi tanah dengan struktur yang cenderung gersang membuat masyarakat pasrah pada kondisi yang ada, yang seharusnya tidak demikian jika masyarakat berpikir kreatif dan inovatif. Salah satu industri kecil pengolahan kerajinan yang berbasis budaya masyarakat dan berkembang dalam usahanya adalah kerajinan kayu berupa aneka patung dengan berbagai model khas Timor yang sudah berkembang dan pemasaran produknya sampai ke luar negeri dan diminati para kolektor.

Masyarakat belum memanfaatkan iklim musim panas yang panjang selama 8 s/d 9 bulan dalam setahun untuk kegiatan industri pengolahan, yang ada hanya cenderung melakukan aktivitas pengolahan untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Masyarakat memanfaatkan air pada musim penghujan selama 3 s/d 4 bulan dengan bercocok tanam yang bersifat sementara yaitu tanaman hortikultura berupa sayur-mayur dan aneka tanaman lainnya dalam skala kecil dan terbatas yang pemanfaatannya untuk keperluan sendiri dan bila ada kelebihan dijual.

Menurut Bapak Octas Tallo, industri pengolahan berbasis kehutanan dan pertambangan yang paling cocok dilakukan di Kabupaten TTS sementara industri berbasis komoditi ubi-ubian dan jagung yang paling bisa dikembangkan menjadi industri pengolahan dengan skala kecil. Sumberdaya manusia pendukung pengembangan sektor industri pengolahan masih sangat rendah dari sisi pengetahuan dan keterampilan sehingga hasil yang didapat juga rendah. Sumber daya manusia yang cocok untuk pengembangan sektor industri pengolahan adalah sumber daya manusia yang menguasai keterampilan, tehnik pemasaran dan yang utama memiliki motivasi untuk maju.

Banyak kebijakan yang sudah diprogram pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor industri pengolahan namun masih banyak kendala menyangkut implementasi di masyarakat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah cocok, namun budaya dan kebiasaan masyarakat sulit diubah. Bentuk kebijakan saat ini untuk pengembangan sektor industri pengolahan masih relevan, hanya perlu motivasi saja. Penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah dalam sektor industri masih sangat rendah, karena terkendala pada budaya.

Menurut beliau pelaksanaan program pengembangan sektor industri pengolahan di masyarakat sudah berjalan namun perlu ditingkatkan, dan kegiatan pembinaan yang tepat bagi pengembangan sektor industri pengolahan adalah: pemberian keterampilan dan motivasi agar pola berpikir masyarakat dapat berubah untuk maju. Pabrik berskala besar sangat mungkin didirikan di Kabupaten TTS bila didukung oleh semua pihak, dan industri skala

kecil dan menengah yang cocok untuk mendukung ketahanan pangan keluarga di daerah ini adalah industri pengolahan berbasis hasil pertanian dan peternakan seperti nampak pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Produk IK Pengolahan Pangan Kab. TTS

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil Pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi pertimbangan sebagai obyek penelitian, karena beberapa hal: sektor industri pengolahan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten TTU sama dengan Kabupaten Kupang terhadap PDRB Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT terhadap Provinsi NTT, padahal secara geografis sangat berbeda juga dari keanekaragaman penduduk, dan kondisi sosiologi masyarakat yang mayoritas beragama Katolik, dan kurangnya sarana transportasi udara sehingga harus melalui Kabupaten Belu atau ke Kota Kupang. Kondisi yg sama hanya pada sarana prasarana perdagangan seperti terdapat pelabuhan, dan sarana jalan dan jembatan. Keterwakilan dalam mayoritas penduduk yang memeluk agama Katolik menarik untuk dilihat lebih jauh dan potensi daerah yang beranekaragam serta posisi strategis yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Masyarakat TTU juga disebut Atoin Pah Meto (bahasa Dawan), dengan 3 suku besar yaitu, Miomafo, Insana, dan Biboki (Biiinmafo).

Kebijakan pengembangan industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara bersifat pelaksanaan lanjutan dari program yang sudah ada dan disiapkan turunannya dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dan tidak secara spesifik melihat kebutuhan industri kecil pengolahan pada daerah tersebut.

Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut terjadi yang juga sama dimiliki oleh daerah lain kecuali yang berbeda adalah bahan baku industri kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara berasal dari dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan tersedia cukup banyak untuk mendukung kegiatan industri kecil pengolahan bahkan kapasitas bahan bakunya melampaui kebutuhan kapasitas produksi sehingga bahan baku itu dijual ke daerah lain yang membutuhkan kecuali industri yang menggunakan bahan baku rumput laut mendatangkan rumput laut kering dari Kabupaten Kupang.

Karakteristik pengusaha kecil pengolahan di Kabupaten Timor Tengah Utara beragam model, namun pada umumnya masih tergantung pada pembinaan pemerintah dan belum memiliki kemandirian berusaha, umumnya pengusaha industri kecil pengolahan memiliki jiwa wirausaha yang rendah dan tetap eksis bila di topang pemerintah, dan akan berkurang atau mati sama sekali bila dibiarkan berusaha sendiri. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum maksimal dalam mendukung pengembangan industri kecil pengolahan, kebijakan pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan teori-teori dalam peningkatan ekonomi daerah yang kebanyakan disebabkan karena alasan politis.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal dalam pemberdayaan ekonomi daerah sesuai teori Pengembangan Daya Saing sesuai Sumber Daya, untuk sumber daya alam Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki potensi hasil kehutanan dan pertambangan dan peternakan. Industri yang mungkin dikembangkan dalam skala kecil dan menengah adalah industri yang berbasis komoditi pertanian yaitu Jagung dan Ubi Kayu contoh Industri pengolahan Jagung dan Gaplek. Sumberdaya manusia pendukung industri pengolahan masih sangat rendah baik dalam jumlah maupun keterampilannya, dan umumnya belum berminat pada sektor industri pengolahan.

Masyarakat yang berorientasi bisnis dapat melakukan kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan (Agribisnis). Pengembangan sektor industri pengolahan belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah daerah, hal ini terlihat dari program pemerintah yang masih berorientasi pada budidaya tanaman (hulu) belum pada sektor industri pengolahan (hilir), hal tersebut menyebabkan perkembangan industri sangat lambat. Masyarakat belum

sepenuhnya menerima program pemerintah dalam kegiatan industri, oleh karena itu sebaiknya program pemerintah adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif ke komersial.

Untuk saat ini mustahil didirikan pabrik berskala besar di Kabupaten TTU. Strategi terbaik memaksimalkan penggunaan potensi sumber daya dan pengembangan usaha adalah memperluas pangsa pasar, kekuatan peningkatan sektor industri pengolahan adalah adanya potensi bahan baku namun kelemahannya adalah tidak didukung dengan SDM yang terampil. Pengaruh lembaga keagamaan antara lain agama Katolik sebagai agama mayoritas dan agama lainnya dalam mendukung pengembangan industri pengolahan adalah dengan melatih umat melalui keterampilan pertukangan, khususnya bangunan. Sementara untuk industri mebel dan perlengkapan rumah tangga dimiliki oleh masyarakat dari suku Makasar/Bugis dan Jawa, dan terlihat di seputar Kota Kefamenanu.

Sektor perdagangan kecil di pasar didominasi oleh pedagang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak kurang lebih 60% dari total pedagang di lokasi tersebut. Sektor jasa pertukangan masyarakat TTU justru eksis/berkembang di luar wilayah TTU sampai ke Kupang sementara di daerahnya sendiri kurang berkembang. Kondisi modal usaha menjadi terbatas karena keuangan keluarga sebagian besar diperuntukkan bagi acara adat dan sosial budaya. Bantuan mesin peralatan pengembangan usaha tidak digunakan maksimal, bahkan terkadang salah sasaran sehingga usaha tetap kurang berkembang.

Narasumber selanjutnya adalah Bapak Kristoforus Nggadas, SE.MT, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara yang secara tegas mengatakan bahwa sektor industri pengolahan kurang berkembang walau banyak program pemberdayaan, disebabkan karena pengusaha kecil tidak memiliki daya tahan untuk melakukan usaha dalam jangka waktu yang lama. Banyak anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan langsung di desa, namun belum memberikan kontribusi bagi PDRB daerah, karena kurangnya 3 K, yaitu kontinuitas, kualitas, dan kapasitas usaha yang dilakukan masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat juga dilakukan oleh pihak-pihak di luar pemerintah namun tidak berpengaruh signifikan dalam struktur ekonomi daerah, karena pengusaha kecil ingin segera mendapatkan hasil dalam bentuk laba, namun tidak bertahan dalam usaha. Pemanfaatannya sangat maksimal dan efisien karena daerah ini memiliki sumber air yang terbatas dan diusahakan tercukupkan untuk kehidupan mereka, sementara untuk usaha industri pengolahan belum tersentuh sama sekali.

Industri yang paling cocok adalah industri garam, saat ini pemerintah daerah sudah menyiapkan gudang tempat penampungan garam, dan untuk mesin peralatan akan disiapkan pada tahun berikutnya. Kualitas sumber daya manusia sangat tidak memenuhi pengembangan sektor industri pengolahan, karena saat ini hanya ada 1 sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan tata boga sehingga belum memberikan efek kepada masyarakat untuk senantiasa melakukan kegiatan ekonomi produktif.

Penetapan pemerintah untuk komoditi bawang putih siung tunggal hanya didasarkan pada citarasa serta aroma dan tidak pada pertimbangan ekonomis, begitu juga komoditi lain seperti jagung yang masih didatangkan dari daerah lain di Indonesia. Komoditi lain yang bisa dijadikan industri adalah komoditi ubi kayu, terutama ubi kayu super. Untuk pengolahan nonpangan seperti tenun ikat dll, sudah menjadi budaya masyarakat untuk memakai kain tenun pada acara adat dan pemerintah sudah menyiapkan Artshop sebagai salah satu cara untuk mendorong pemasaran, namun belum dioperasikan.

Kebijakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah mengubah pola pikir masyarakat agar mau melakukan kegiatan usaha/kegiatan ekonomi produktif, atau berwirausaha. Kebijakan yang paling tepat adalah menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan di lembaga pendidikan dari tingkatan rendah sampai dengan tinggi. Penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pemerintah di sektor industri pengolahan masih jauh dari harapan, hanya terlihat aktif di awal dan selanjutnya bila tidak didampingi lagi akan melemah dan berhenti dengan sendirinya. Adapotensi batu alam berwarna hitam di sekitar daerah Wini. Batu hitam ini cikal bakal industri besar, sebagai penghias interior/eksterior di hotel berbintang di NTT, maupun di provinsi lain. Kini sudah tersedia alat pemotong namun belum dimanfaatkan optimal, alat tersebut bermata intan dan untuk usaha ini dibutuhkan kelompok bukan perorangan yang memiliki keterampilan.

Narasumber berikut adalah Drs. Joseph Kuabib, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mengatakan bahwa potensi daerah sangat mendukung, seperti hasil hutan dan ternak, kelemahannya adalah kurangnya dukungan SDM dan modal usaha, sehingga menghambat pengembangan usaha. Strategi memaksimalkan penggunaan potensi sumber daya adalah: membangun jaringan kerja sama dengan pihak lain, termasuk swasta, LSM, dll.

Bapak Ignasius L.O.I.Sea.Sos dari Badan Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa sebagai salah satu narasumber berikut mengatakan bahwa : 5 Komoditi andalan Kabupaten Timor Tengah Utara, adalah: Sapi, Kacang Tanah, Jagung, Bawang Putih Siung Tunggal, Garam. Program pemberdayaan masyarakat yaitu Sari Tani, dengan memberikan dana sebesar Rp 300 juta kepada setiap desa sampai 144 desa se Kabupaten TTU mendapatkan

perguliran dana dengan pembagian: tahun pertama: 24 desa, tahun kedua: 36 desa, tahun ketiga: 36 desa, tahun keempat: 48 desa.

Kebutuhan terkait peluang untuk pemanfaatan sumber daya, yang paling memungkinkan adalah sektor pertanian dan pertambangan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Investasi yang cocok untuk perbaikan dan peningkatan sumber daya adalah investasi dalam infrastruktur, akses pasar, modal usaha, serta keamanan dan kenyamanan berusaha. Sumberdaya yang unik dan menjadi ciri khas Kabupaten Timor Tengah Utara dan memiliki potensi pemasaran ke depan dengan kualitas yang terbaik adalah batu akik. Seperti nampak pada Gambar 5 di bawah ini:



Gambar 5. Batu Akik dari Kabupaten Timor Tengah Utara

IV. KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa provinsi NTT belum lepas dari berbagai kondisi yang menampilkan ketertinggalan dalam banyak aspek, terutama pada kawasan Timor Barat yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara. Kemiskinan masih ada di provinsi ini, yang terlihat dari pendapatan perkapita NTT hanya seperlima dari pendapatan perkapita nasional, sehingga rata-rata pendapatan masyarakat NTT masih di bawah garis normal pendapatan nasional. Pemerintah NTT dan pemerintah kabupaten/kota di kawasan Timor Barat memandang serius kondisi ini dan melakukan berbagai program pembangunan, terutama pembangunan ekonomi untuk menyelesaikan persoalan ini melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan member-dayakan ekonomi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota belum memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat. Hal tersebut nampak dari profil PDRB NTT yang menegaskan kontribusi sektor sekunder yang sangat rendah, dan tidak mencapai target sebesar 2 % bahkan semakin menurun menjadi 1,23 % dimana rata-rata kontribusi pada PDRB provinsi dalam 12 tahun terakhir ini hanya 1,49 % saja. Sementara sektor primer yang sangat besar yaitu 78,5 %, serta sektor tersier antara 18 s/d 20 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A. A., Rumagit, G. A., & Katiandagho, T. M. (2015). Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. *Cocos*, 6(8), 1-23.
- Beliu, J. J., & Fina, Y. N. (2019). *Kajian Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Paper presented at the Conference on Public Administration and Society.
- Dong-Sung, C., & Moon, H.-C. (2003). *From Adam Smith to Michael Porter: Evolusi Teori Daya Saing*.
- Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. *California management review*, 33(3), 114-135.
- Irawati, E., Mirzah, M., & Saladin, R. (2014). Berbagai teknik pengolahan terhadap kualitas ikan tongkol (*Eutynnus* sp) afkir sebagai pakan ternak. *Jurnal Peternakan*, 11(1), 1-7.
- Kleden, M. M., Ratu, M., & Randu, M. D. (2015). Kapasitas tampung hijauan pakan dalam areal perkebunan kopi dan padang rumput alam di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. *ZOOTEC*, 35(2), 340-350.
- Kobesi, P., Kinseng, R. A., & Sunito, S. (2019). Kelas Dan Potensi Konflik Nelayan Di Kota Kupang (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 157-170.

- Kumalawati, A., Sir, T. M., & Mastaram, Y. (2013). Analisis Pengaruh Penggunaan Abu Batu Apung Sebagai Pengganti Filler Untuk Campuran Aspal. *Jurnal Teknik Sipil*, 2(2), 191-200.
- Mulu, M., Ngalu, R., & Lazar, F. L. (2020). Pola Tanam Tumpang Sari di Desa Satar Punda Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 72-78.
- Ningsih, C. (2014). Sinergitas industri kreatif berbasis pariwisata dengan strategi pembangunan industri nasional menuju globalisasi. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure*, 11(1), 59-64.
- Octavia, D., Yeny, I., & Ginoga, K. L. (2020). *Pengelolaan hutan secara partisipatif menuju KPH hijau untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sari, M. P. P., & Setyawan, I. (2017). Pengalaman menjadi biarawati Katolik: Studi kualitatif interpretative phenomenological analysis. *Jurnal Empati*, 6(1), 287-290.
- Suwati, S., Ihromi, S., & Asmawati, A. (2019). Konsentrasi Penambahan Gula Merah Terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik Dendeng Ikan Lemuru (*Sardinelle longiceps*). *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1), 112-119.